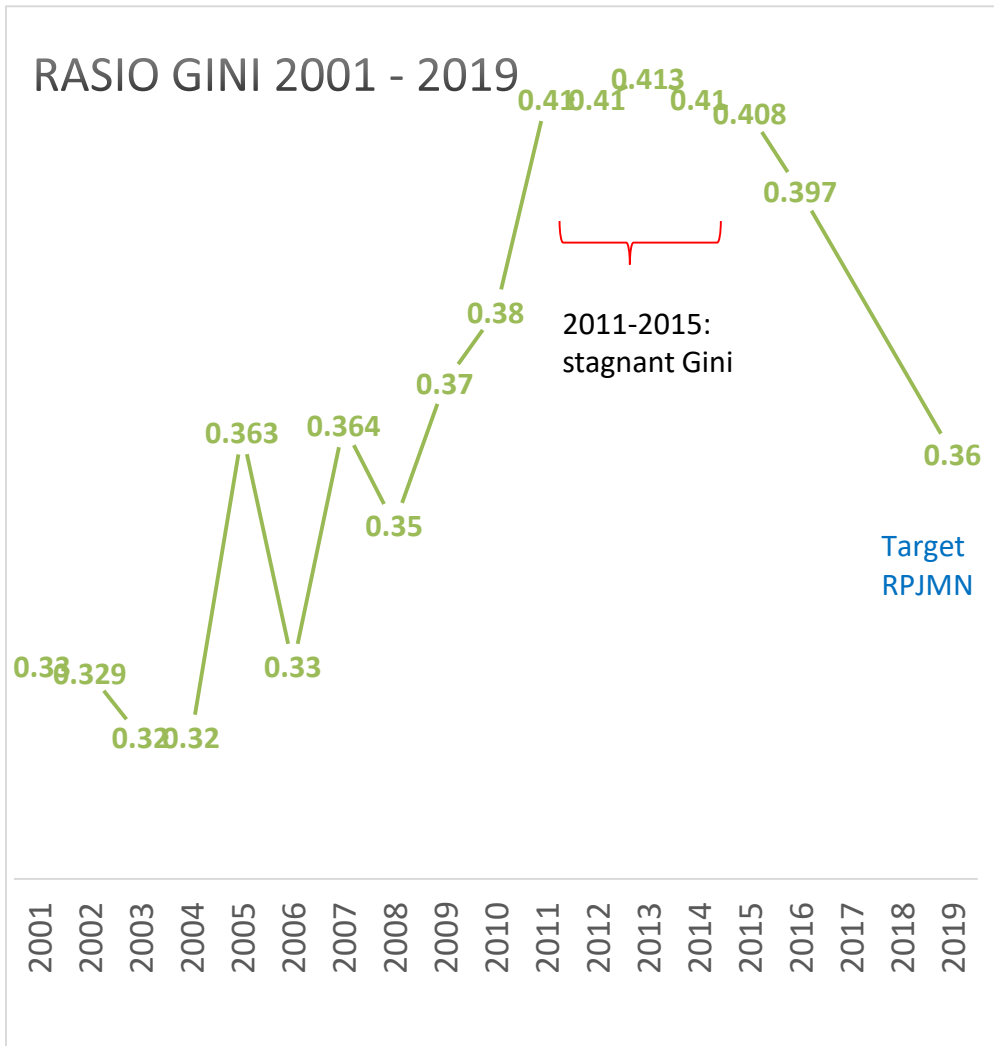


DINAMIKA KETIMPANGAN DESA-KOTA DI MAKASSAR RAYA: SEBUAH PERSPEKTIF KEBIJAKAN

Athia Yumna - The SMERU Research Institute
Makassar, 8 Mei 2018



Urgensi Isu Ketimpangan di Indonesia



- Tren ketimpangan yang meningkat setelah Reformasi
- Hubungan ketimpangan dengan pembangunan ekonomi → *'dual causality'*
- Dampak ketimpangan terhadap stabilitas sosial
- Penurunan ketimpangan menjadi salah satu target utama dalam RPJMN 2015-2019

Tujuan, Disain, dan Lokasi Studi

Tujuan Studi

- Melihat dinamika ketimpangan desa-kota dan perbedaan ketimpangan dalam satu wilayah dan antar wilayah dalam koridor Makassar Raya
- Mengkaji alternative kebijakan penurunan ketimpangan di daerah

Studi Kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif

- wawancara, FGD, observasi, data sekunder daerah

Lokasi studi

Kab. Maros

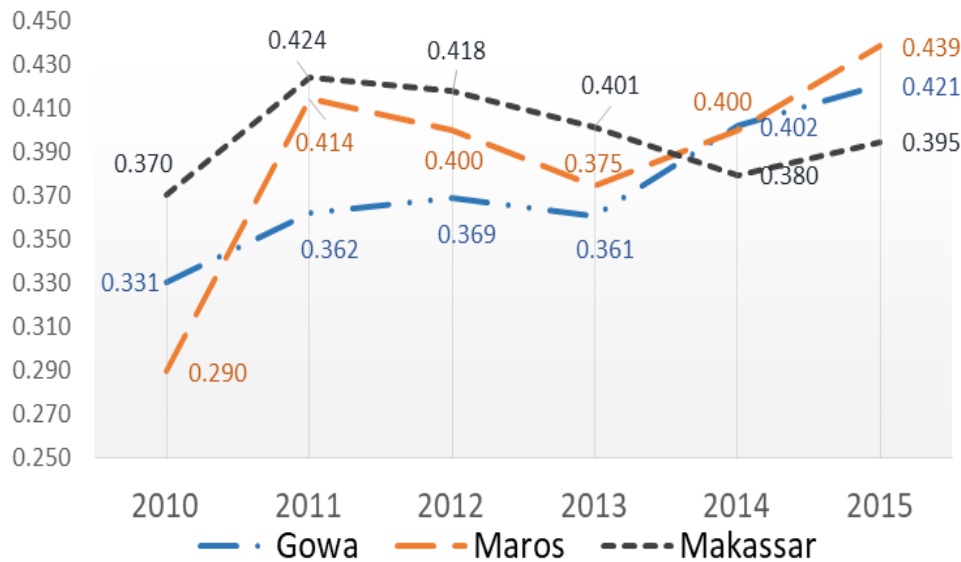


Kota Makassar

Kab. Gowa

Secara umum, ketimpangan meningkat di Kota Makassar, Kab. Gowa, dan Kab. Maros pada 2010-2015

Koefisien Gini di Makassar Raya



- Laju peningkatan Gini di daerah yang berubah karakteristik wilayahnya lebih cepat daripada di daerah yang karakteristiknya tetap.
- Peningkatan ketimpangan berkaitan dengan dinamika pembangunan sosial-ekonomi dan spasial.

Within and Between Region Inequality

- Terjadi ketimpangan di dalam wilayah kab/kota (*within or intraregion inequality*). Beberapa penyebab yang dapat menjelaskan:
 - Lokasi (jarak dan akses ke pusat ekonomi, potensi wilayah, infrastruktur, dan kondisi sosial (pola pikir, pendidikan, dan budaya)
- Di saat yang sama, terdapat ketimpangan antarkabupaten/kota (*between or inter-region inequality*) yang bisa berasal dari sumber yang sama dengan ketimpangan di dalam wilayah ditambah dengan beberapa faktor lain:
 - pembangunan infrastruktur lintas kab/kota dan dampak positif serta negatifnya
 - Perbedaan insentif dari program/kebijakan lokal di setiap kab/kota

Pemahaman para pemangku kebijakan dan respon kebijakan di daerah terhadap isu ketimpangan

- Pemahaman para pemangku kebijakan yang rendah. Ketimpangan diasosiasikan dengan:
 - Isu ketimpangan regional dan tidak dilihat sebagai isu multidimensi
 - Kemiskinan sehingga kebijakan untuk mengatasinya juga disamakan dengan kebijakan mengatasi kemiskinan
- Respon kebijakan pemerintah daerah terbatas dan parsial terhadap masalah ketimpangan.
 - agenda Pemerintah Pusat belum sinkron dengan agenda di daerah
 - Belum ada indikator yang jelas untuk mengukur ketimpangan di daerah sehingga program yang diklaim untuk mengatasi ketimpangan tidak memiliki target yang jelas

Implikasi Kebijakan

- Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan indikator ukuran ketimpangan yang jelas di tingkat kab/kota
- Mendorong sinkronisasi agenda dan target nasional ke dalam agenda dan target pemda provinsi dan kab/kota:
 - Mengarusutamakan isu ketimpangan ke dalam rencana pembangunan dan program pemda
 - Memberikan bantuan teknis kepada pemda untuk meningkatkan pemahamannya tentang isu ketimpangan
 - Memasukkan indikator resmi ketimpangan sebagai target rencana, program, dan kegiatan pemda
- Mendorong kerja sama dan koordinasi antarkabupaten/kota untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah.
 - meningkatkan konektivitas dan sinkronisasi regulasi/program antardaerah

TERIMA KASIH



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

 @SMERUInstitute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute